

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

NAMA : NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI

NPM : 1805170088

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI
NPM : 1805170088
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.

Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI
N.P.M : 1805170088
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 11 Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	tabel dan gambar diubah tambah satu dan di pindah	11/8 23	3/1
Bab 5	perbaiki kesimpulannya, susun lebih awal pindah ya ke 1/2/13	11/8 22	3/1
Daftar Pustaka	sitasi di tambah min 5 dosen	11/8 23	3/1
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Skrupin Lann Serdang	1/8 23	3/1

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, 11 April 2023
Dosen Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	perbaiki tabel validitas, sehingga srg.	8/5/23	3/
Bab 4	- buat tabel U+ H pengembalian - tabel tanggap Receipt pajak, dan di tambah keterangan	8/5/22	3/
Bab 5	- pedoman kesimpulan dan pada	8/5/21	3/
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, 08 April 2023
Dosen Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	Buat yg Instrumen penelitian dan maka hasil nya.	1/4 23	2/
Bab 4	revisi sistem oleh penulisan dan keaslian, revisi dan lebih di kegiatan penelitian yg detail.	1/4 23	2/
Bab 5	revisi lampiran. sama harus sama hari penelitian.	1/4 23	2/
Daftar Pustaka	gunakan mately. s	1/4 23	2/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		2/

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, 01 April 2023
Dosen Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI

NPM : 1805170088

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang ”adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : nabnabhilla@gmail.com

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, dengan jenis penelitian kuantitatif dan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *accidental sampling*, dengan jumlah responden 36 responden. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat pengujian SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang positif. Penilaian resiko berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa Penilaian resiko yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang positif. Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa Aktivitas pengendalian yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang positif. Sistem informasi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa Sistem informasi yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang positif. Pemantauan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa Pemantauan yang

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT INTERN CONTROL SYSTEMS ON REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN DEVICE ORGANIZATIONS DISTRICT AREA DELI SERDANG

NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI

**Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of North Sumatra
Email : nabnabhilla@gmail.com**

This research is a research conducted to determine the effect of the internal control system on regional financial management in regional apparatus organizations in Deli Serdang regency. This study uses an associative approach, with quantitative research types and primary data sources obtained from distributing questionnaires. The sampling technique in this study was using accidental sampling technique, with a total of 36 respondents. The analysis carried out in this study used multiple linear regression analysis with the SPSS testing tool.

Based on the results of the study, it was concluded that the Control Environment has a positive effect on Regional Financial Management in the Deli Serdang OPD, this indicates that a good control environment will increase positive regional financial management. Risk assessment has a positive effect on Regional Financial Management at OPD Deli Serdang, this shows that a good risk assessment will increase positive regional financial management. Control activities have a positive effect on regional financial management in the Deli Serdang OPD, this shows that good control activities will increase positive regional financial management. The information system has a positive effect on Regional Financial Management at the Deli Serdang OPD, this shows that a good information system will increase positive regional financial management. Monitoring has a positive effect on Regional Financial Management at the Deli Serdang OPD, this shows that Monitoring is

Keywords: Regional Financial Management, Internal Control System

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alam, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Penulisan proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana (S-1) pada program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul proposal skripsi ini yaitu : **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaen Deli Serdang”**.

Selama penulisan proposal skripsi ini tentunya penulis banyak menerima dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang, serta doa restu untuk selalu semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **Assoc. Prof. H. Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.** selaku ketua prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr. Eka Nurmalia Sari, SE., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna bagi peneliti dalam menyelesaikan proposal ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai beserta Staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta informasi yang bermanfaat bagi penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan saran serta dukungan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Akhir kata penulis juga menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak, Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Medan, 15 Agustus 2023

Penulis

Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB 2 LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
a. Pengertian Keuangan Daerah	9
b. Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Keuangan Daerah	11
c. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	16
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	16
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	19
c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	20
2.2 Penelitian Terdahulu	29

2.3 Kerangka Konseptual	30
2.4 Hipotesis Penelitian.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Definisi Operasional.....	36
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.4 Populasi dan Sampel	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	54
4.1.2 Tingkat Pengembalian Angket.....	54
4.1.3 Deskripsi Responden.....	54
4.2 Pembahasan.....	79
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Deli Serdang.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional	38
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	40
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian SKPD di Deli Serdang.....	40
Tabel 3.4 Skala Likert	43
Tabel 3.5 Uji Validitas	44
Tabel 3.6 Uji Reabilitas Variabel X dan Y	47
Tabel 3.7 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	51
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Angket.....	54
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia.....	55
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Lama Bekerja	56
Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Variabel Lingkungan Pengendalian.....	57
Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Variabel Penilaian Resiko.....	59
Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Variabel Kegiatan Pengendalian.....	60
Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Variabel Sistem Informasi	61
Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban variabel Pemantauan	62
Tabel 4.10 Deskripsi Jawaban Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah	63
Tabel 4.11 Uji Kolmogrov-Smirnov	65
Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas.....	67
Tabel 4.13 Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.14 Uji Regresi Linier Berganda	71
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Parsial (Uji T)	73
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Simultan (Uji F).....	77
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Hasil Uji Grafik Histogram	66
Gambar 4.2 Hasil Uji P-Plot	67
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Tujuan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

Dalam sektor publik atau pemerintahan, anggaran berbasis kinerja mulai diterapkan guna pencapaian maksud dan tujuan lembaga. Anggaran merupakan perencanaan strategik dalam mencapai visi dan misi. Untuk menyusun ABK (Anggaran Berbasis Kinerja), pemerintah daerah terlebih dahulu harus

mempunyai Renstra. Renstra merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus menuju, dan bagaimana cara (strategik) untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya, renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategik tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya (positioning) pada masa yang akan datang.(Sari, 2010).

Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu yang pertama Perencanaan, Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang paling krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas hasil (*outcome*) dari pengelolaan keuangan daerah sangat di pengaruhi oleh beberapa bagus perencanaan yang di buat. Pada tahap perencanaan ini dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi input,proses, dan output-nya. Input dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang di miliki pemerintah daerah. Adapun fenomena yang terjadi terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan daerah di Deli Serdang yaitu sering terjadinya perubahan kebijakan di tengah perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan strategis sehingga fokus proyeksi pendapatan berubah dan harus melalui persetujuan P APBD dengan tahapan siding paripurna bersama DPRD Deli Serdang, hal ini tentunya berdampak dalam waktu pelaksanaan dan perubahan perencanaan awal, walaupun sisi positifnya sebagai evaluasi kinerja keuangan dan hal yang terjadi.

<https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-1356-kebijakan-umum-anggaran-kua-dan--prioritas-plafon-anggaran- sementara-pppas-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-papbd-deli-serdang-tahun-anggaran-2021-disetujui.html>

Kemudian indikator dari pengelolaan keuangan daerah yaitu Pelaksanaan, Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusnya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang di rencanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Adapun fenomena yang terjadi terkait perencanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Deli Serdang

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (000 rupiah)		
	2018	2019	2020
A. Pendapatan Daerah	Rp 3.363.304.583,00	Rp 3.573.056.389,00	Rp 3.335.349.827,00
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 729.648.595,00	Rp 825.375.281,00	Rp 809.719.829,00
1.1 Pajak Daerah	Rp 558.329.598,00	Rp 652.563.114,00	Rp 596.316.676,00
1.2 Retribusi Daerah	Rp 38.794.666,00	Rp 34.182.703,00	Rp 47.643.621,00
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 35.636.473,00	Rp 22.017.442,00	Rp 16.190.194,00
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 96.887.858,00	Rp 116.612.023,00	Rp 149.569.338,00
2. Dana Perimbangan	Rp 1.992.298.798,00	Rp 2.000.833.954,00	Rp 1.837.294.623,00
2.1 Bagi Hasil Pajak	Rp 64.707.603,00	Rp 52.300.753,00	Rp 58.059.984,00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp 3.787.196,00	Rp 3.908.912,00	Rp 3.172.723,00
2.3 Dana Alokasi Umum	Rp 1.468.561.952,00	Rp 1.513.584.154,00	Rp 1.376.847.320,00
2.4 Dana Alokasi Khusus	Rp 455.242.047,00	Rp 431.040.134,00	Rp 399.214.596,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 641.357.190,00	Rp 746.847.154,00	Rp 688.335.374,00
B. Pembiayaan Daerah	Rp 198.812.931,00	Rp 123.208.971,00	Rp 83.358.991,00
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 198.810.731,00	Rp 123.179.251,00	Rp 83.357.991,00
2. Penerimaan Lainnya	Rp 2.200,00	Rp 29.720,00	Rp 1.000,00
Jumlah	Rp 3.562.117.514,00	Rp 3.696.265.360,00	Rp 3.418.708.817,00

Source Url: <https://sumut.bps.go.id/indicator/13/674/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-deli-serdang-000-rupiah-.html>
Access Time: October 9, 2023, 12:19 am

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya pengelolaan keuangan daerah dari indikator penganggaran belum terlaksana dengan baik, dimana setiap bulan target anggaran dinaikkan namun pada realisasi penerimaan pajak daerahnya belum mencapai hasil sesuai yang dianggarkan, pemerintah kabupaten deli serdang tidak mampu mencapai target anggaran yang dibuatnya sendiri.

Selanjutnya indikator dari pengelolaan keuangan daerah yaitu Pelaporan, Proses pelaporan dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah

yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka laporan keuangan daerah siap selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Adapun fenomena yang terjadi pada tahapan pelaporan ini yaitu tidak transparansinya pengumuman laporan kinerja pengelolaan keuangan di Deli Serdang, hal ini dikarenakan akses untuk melihat laporan dari Pemkab Deli Serdang sangat susah bahkan tidak tersedia di website resminya.

Dan yang terakhir indikator dari pengelolaan keuangan daerah yaitu evaluasi kinerja, Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah untuk disampaikan kepada DPRD dan masyarakat yang selanjutnya akan digunakan sebagai informasi untuk evaluasi kinerja eksekutif. Adapun fenomena yang terjadi adalah proses evaluasi kinerja dilakukan dengan penyampaian LKPJ dan dalam penyampaian di beberapa tahun terakhir seringkali tidak mencapai PAD yang dianggarkan serta kebijakan evaluasi LKPJ hanya sebatas serah terima kepada DPRD dan evaluasi perbaikan jarang disampaikan.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah Deli Serdang sebagai suatu entitas pelaporan masih mengalami kesulitan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Masalah lainnya adalah laporan keuangan masih cenderung dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan dimaksud, melalui internet, surat kabar atau akses publik lainnya belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan.

Secara umum, permasalahan yang terjadi dikarenakan kelemahan sistem pengendalian intern banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan

Belanja. Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai kualitas laporan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern. Melalui penguatan SPIP, diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat memperoleh opini yang semakin baik.

Sebab dengan meningkatnya opini yang diberikan BPK atas suatu laporan keuangan, berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, SPIP yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2014).

Berdasarkan fenomena dan uraian teori di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadinya perubahan kebijakan di tengah perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan strategis sehingga fokus proyeksi pendapatan berubah
2. Proses penganggaran belum berjalan dengan baik karena masih belum mencapai target.
3. Tidak adanya transparansi pengumuman laporan kinerja pengelolaan keuangan di Deli Serdang
4. Proses evaluasi kinerja dilakukan dengan penyampaian LKPJ kepada DPRD dan dalam penyampaian di beberapa tahun terakhir seringkali tidak mencapai PAD yang dianggarkan serta kebijakan evaluasi LKPJ hanya sebatas serah terima kepada DPRD dan evaluasi perbaikan jarang disampaikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?
4. Apakah Informasi Komunikasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?
5. Apakah Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penilaian Resiko terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Informasi Komunikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk strategi peningkatan kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan.
2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat konsistensi hasil dan perluasan penelitiannya, sehingga bermanfaat sebagai pembanding dan pengembangan hasil penelitian sejenis.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian ilmiah yang akan dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Baldric (2017: 12)

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasakeadilan, kepatuhan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Hendra (2017: 2).

Haryani (2011) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari beberapa uraian teori di atas dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah uraian kegiatan sistematis dan terstruktur yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah daerah bersama struktur pemerintahannya dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan daerah.
- 4) Pengeluaran daerah.
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

b. Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat 2 mempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- 3) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- 4) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- 5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

- 6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- 8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

Adisasmita (2011) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau, tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan, pengelolaan keuangan daerah memiliki tujuan:

- 1) Menjamin pekerjaan mengikuti rencana
- 2) Mencegah kekeliruan
- 3) Memperbaiki efisiensi
- 4) Mewujudkan ketertiban dan pekerjaan
- 5) Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan
- 6) Mengenali dan menggambarkan prestasi yang maksimal
- 7) Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan.

Halim (2002) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Kuswandi (2016) pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan yang dilakukan agar pengeluaran-pengeluaran daerah benar-benar digunakan sebagai yang diharapkan, sedang dipihak lain agar supaya penerimaan-penerimaan daerah dapat disetor ke Kas Daerah secara tepat waktu, serta agar

jumlah-jumlah yang telah ditetapkan dapat direalisasikan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah.

c. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, Adapun indikator dari Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :

1) Perencanaan

Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan.

2) Penganggaran

Pemerintah menyusun rencana belanja dan pendapatan dengan mengacu pedoman dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

3) Pelaksanaan

Anggaran pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan melalui rekening pemerintah.

4) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara.

5) Pelaporan

Pelaporan merupakan rutinitas yang harus dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas atau keseimbangan pemerintah dengan mengantisipasi penyelewengan dan Tindakan yang tidak diinginkan.

6) Pertanggung Jawaban

Merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kesediaan dan penyampaian hasil laporan yang telah dilaporkan dengan siap menerima konsekuensi yang telah ditetapkan.

7) Pengawasan

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Sedangkan menurut Mahmudi (2019: 16), Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1) Tahap Perencanaan

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang paling krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas hasil (outcome) dari pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa bagus perencanaan yang di buat. Pada tahap perencanaan ini dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi input, proses, dan output-nya. Input dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang di miliki pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat

proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan output perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- d. Rencana Srtategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensra SKPD)
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)
- f. Kebijakan Umum APBD (KUA)
- g. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

2) Tahap Pelaksanaan

Output dari perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Output perencanaan tersebut akan menjadi input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusnya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang di rencanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan ketidak akuratan laporan keuangan. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan output dari tahap pelaksanaan.

3) Tahap Pelaporan

Output dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan

menjadi input bagi tahap pelaporan. Input tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan di publikasikan. Proses pelaporan dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka laporan keuangan daerah siap selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

4) Tahap Evaluasi Kinerja

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah untuk disampaikan kepada DPRD dan masyarakat yang selanjutnya akan digunakan sebagai informasi untuk evaluasi kinerja eksekutif. LKPJ kepala daerah terdiri atas laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja program/kegiatan.

Dari beberapa teori di atas maka indikator pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori Mahmudi (2019: 16) yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem

Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah seharusnya dilandasi dengan pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Pengertian utama tentang sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : “Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerinta deaerah”.

Selama ini acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada instansi pemerintah adalah pengawasan melekat yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan dan pengawasan, instruksi presiden No. 01 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat, yang telah disempurnakan melalui keputusan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004.

Definisi pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut:

“Pengawasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern dan selanjutnya disebut waskat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan suatu kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku”.

Terminologi pengawasan melekat dalam aturan tersebut disepadankan dengan pengendalian manajemen atau pengendalian intern. Unsur-unsur pengawasan yang melekat yang dimaksud adalah pengorganisasian personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervise, dan review intern.

Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang diciptakan manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Senada dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mendefinisikan sistem pengendalian sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian, efektifitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan”.

Sedangkan sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen, jika manajemen puncak merasa bahwa pengendalian intern itu penting maka anggota dalam organisasi akan merasakan hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Di lain pihak, jika pengendalian intern tidak dijadikan kepentingan utama manajemen puncak dan hanya dijadikan lip service maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian intern tidak dapat dicapai dengan efektif.

Menurut tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera dalam pengertian pengendalian menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway Commision).

Sedangkan tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang :

- 1) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
- 2) Keandalan Pelaporan Keuangan.
- 3) Pengamanan Aset Negara.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Agar mencapai pengendalian intern yang memadai maka diperlukan beberapa komponen pengendalian intern seperti yang diungkapkan COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway), penelitian COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway) mengatakan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang ada dibawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai. Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, bukan absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian resiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Berdasarkan kelima komponen SPIP tersebut dapat diketahui bahwa komponen lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk keseluruhan komponen. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi merupakan saluran (*channel*) terhadap ketiga komponen pengendalian lainnya (Mahmudi 2010: 22).

Penerapan unsure-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian intergral dari kegiatan instansi pemerintah.

a) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Dalam menerapkan unsur pengendalian intern, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika, yang dapat dilakukan dengan :
 - 1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
 - 2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.
 - 3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

- 4) Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern.
 - 5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- b. Komitmen terhadap kompetensi, yang dapat dilakukan dengan:
- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
 - 2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap penugasan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
 - 3) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
 - 4) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- Merupakan kemauan dan kemampuan pimpinan untuk mampu menciptakan suasana yang kondusif yang mampu mendorong stafnya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Griffin dan Ebert dalam Modul Lingkungan Pengendalian BPKP Tahun 2009, gaya kepemimpinan yang dikenal ada 3 (tiga) jenis, yaitu :

1) Gaya kepemimpinan otokratik

Merupakan bentuk kepemimpinan dimana seorang pimpinan cenderung memberi perintah secara langsung dan meminta bawahannya untuk mematuhi.

2) Gaya kepemimpinan demokratis

Merupakan bentuk kepemimpinan dimana seorang pimpinan memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk memberikan masukan kepada atasannya sebelum mengambil keputusan.

3) Gaya bebas terkontrol

Merupakan bentuk kepemimpinan dimana pimpinan memposisikan dirinya sebagai seorang konsultan bagi stafnya dan cenderung memberi kewenangan kepada stafnya untuk mengambil keputusan. Menurut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepemimpinan yang kondusif dapat dilakukan dengan :

- a) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.
- b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja.
- c) Mendukung fungsi tertentu dalam SPIP.
- d) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.
- e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.
- f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, pelanggaran, program, dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat dilakukan dengan :

- 1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah
- 2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah.
- 3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi pemerintah.
- 4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.
- 5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
- 2) Pegawai yang diberi wewenang memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- 3) Pegawai yang diberi wewenang tersebut memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, yang dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
- 2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen
- 3) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif, yang dapat dilakukan dengan:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 2) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2) Penilaian Risiko

Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang

ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

Proses penilaian risiko berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

- 1) Identifikasi risiko, yang dapat dilakukan dengan Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. Dan Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan faktor eksternal.
- 2) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- 3) Analisis risiko, yang dapat dilakukan dengan Menetapkan kemungkinan terjadinya risiko dan Menetapkan dampak yang timbul akibat risiko dengan diidentifikasi benar- benar terjadi.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur.

Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan- urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai

dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kegiatan pengendalian yang ada memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara tertulis.
- 6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, untuk dapat menciptakan komunikasi atas informasi menjadi efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus dapat memenuhi beberapa hal, yaitu:

- 1) Mampu menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi.
- 2) Mampu mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud. Pemantauan atas pengendalian intern dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 2.1 Pemantauan berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- 2.2 Evaluasi terpisah, dapat dilakukan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
- 2.3 Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	HASIL PENELITIAN
1.	¹ Eka Nurmala Sari 2010	Konsep Anggaran Dalam Perspektif Balance Scorecard : Suatu Tinjauan Teoritis	Hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut: Dalam sektor publik atau pemerintahan, anggaran berbasis kinerja mulai diterapkan guna pencapaian maksud dan tujuan lembaga. Anggaran merupakan perencanaan stratejik dalam mencapai visi dan misi. Untuk menyusun ABK (Anggaran Berbasis Kinerja) , pemerintah daerah terlebih dahulu harus mempunyai Renstra. Renstra merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus menuju, dan bagaimana cara (stratejik) untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya, renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan stratejik tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya (positioning) pada masa yang akan datang.
2.	¹ Elizar Sinambela ² Fitriani Saragih ³ Eka Nurmala Sari 2018	Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara	Hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut: Pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara belum efektif terlihat dari APBD yang menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja belum dapat mencapai target, Pada Struktur APBD saat ini masih belum sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pada bagian pembiayaan daerah yang ternyata belum jelas

			diungkap pada struktur APBD, selain itu dapat dinyatakan pula bahwa masih perlunya adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah Sumatera Utara untuk menganalisis lebih lanjut terhadap struktur APBD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	¹ Dodik Slamet Pujiono ² Hari Sukarno ³ Novi Puspitasari 2016	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara) -	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagai berikut: Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara, Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara, Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara.
4.	¹ Oka Reza ditya ² Welly Surjono 2012	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu

2.3 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi awal untuk pengembangan sistem pengendalian internal dengan menyediakan disiplin dan struktur yang bersifat fundamental. Hal ini sangat menentukan warna dari sebuah perusahaan dan memberi dasar bagi cara pandang terhadap risiko dari setiap orang di dalam perusahaan tersebut. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana

pengendalian dalam suatu perusahaan dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pentingnya sebuah pengendalian. (Zamzami et al. 2018)

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, prosedur, yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Inti dari keberhasilan dalam pengendalian entitas terletak pada sikap manajemen puncak sangat fokus terhadap pengendalian, maka anggota entitas lainnya juga akan bersikap demikian. (Hery, 2017)

Berdasarkan teori serta didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Sinambela, Saragih dan Sari (2018), Ditya dan Suryono (2012) serta Ditya dan Surjono (2012) Ristanti (2016) dan Trisnani (2018) maka ditarik sebuah hipotesis bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengaruh Penilaian Resiko terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian resiko merupakan aktivitas yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, jika perusahaan sering mengalami kesulitan dalam menagih piutang usaha, maka perusahaan harus menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko lebih saji piutang usaha. (Hery, 2019) Penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. penilaian risiko pada dasarnya adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Tujuan penilaian risiko adalah menetapkan kemungkinan yang dapat terjadi dan dampak dari suatu

kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan agar dapat dilakukan penanganan terhadap risiko secara tepat.

Berdasarkan teori serta didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016), Ditya dan Surjono (2012) dan Sinambela, Saragih dan Sari (2018), Ristanti (2016) dan Trisnani (2018) maka ditarik sebuah hipotesis bahwa penilaian resiko berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai

Berdasarkan teori serta didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Sinambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012) Ristanti (2016) dan Trisnani (2018) maka ditarik sebuah hipotesis bahwa penilaian resiko berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

4. Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi dan Komunikasi: Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

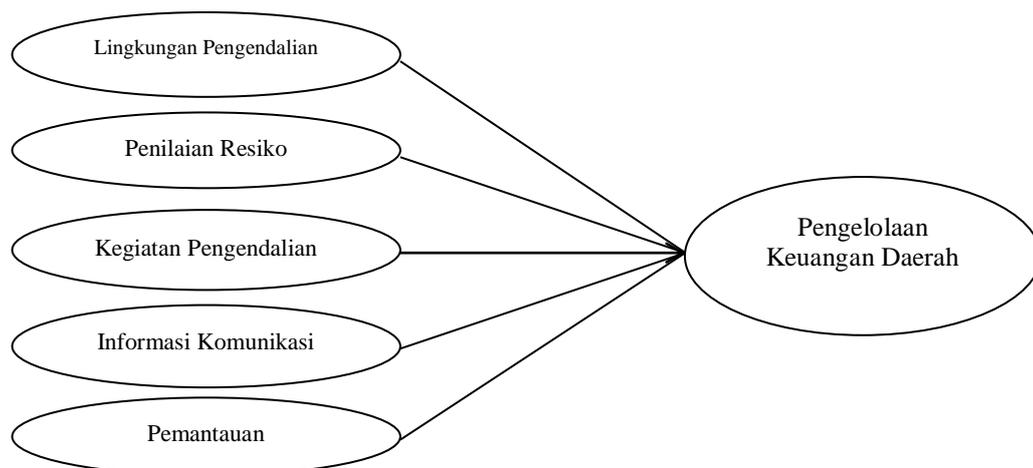
Berdasarkan teori serta didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Nambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012) Ristanti (2016) dan Trisnani (2018) maka ditarik sebuah hipotesis bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

5. Pengaruh Pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Berdasarkan teori serta didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Nambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012) Ristanti (2016) dan Trisnani (2018) maka ditarik sebuah hipotesis bahwa pemantauan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka seperti berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual, maka dapat ditarik hipotesis bahwa :

- 1) Lingkungan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- 2) Penilaian Resiko berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- 3) Kegiatan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- 4) Informasi Komunikasi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- 5) Pemantauan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini meneliti pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian. Menurut (Sugiyono,2018) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini meliputi :

1) Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah uraian kegiatan sistematis dan terstruktur yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah daerah bersama struktur pemerintahannya dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Mahmudi,2019). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Perencanaan
- b) Pelaksanaan
- c) Pelaporan
- d) Evaluasi Kinerja

2) Lingkungan Pengendalian (X₁)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern (Mahmudi,2019). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Integritas
- b) Komitmen
- c) Kepemimpinan
- d) Struktur
- e) Pendelegasian Wewenang

3) Penilaian Resiko (X₂)

Penilaian resiko merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hal-hal terburuk yang tidak diinginkan (Mahmudi,2019).

Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Identifikasi Resiko
- b) Faktor Resiko
- c) Analisis Resiko

4) Kegiatan Pengendalian (X₃)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada (Mahmudi,2019). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pokok
- b) Penyesuaian
- c) Keterkaitan
- d) Kebijakan Prosedur

5) Informasi Komunikasi (X₄)

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik (Mahmudi,2019). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Penyediaan dan Pemanfaatn
- b) Pengelolaan Kebijakan Prosedur

6) Pemantauan (X₅)

Pemantauan adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif (Mahmudi,2019). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Berkelanjutan
- b) Evaluasi terpisah
- c) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tabel 3.1 Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan 4. Evaluasi kinerja	Ordinal
Lingkungan Pengendalian (X ₁)	Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern	1.Integritas 2. Komitmen 3. Kepemimpinan 4. Struktur 5. Pendelegasian Wewenang	Ordinal
Penilaian Resiko	Penilaian resiko merupakan	1. Identifikasi	Ordinal

(X ₂)	sebuah upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hal-hal terburuk yang tidak diinginkan	Resiko 2. Faktor Resiko 3. Analisis Resiko	
Kegiatan Pengendalian (X ₃)	Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada.	1. Kegiatan Pokok 2. Pemyesuaian 3. Keterkaitan 4. Kebijakan Prosedur	Ordinal
Informasi Komunikasi (X ₄)	Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik.	1. Penyediaan dan Pemanfaatan 2. Pengelolaan	Ordinal
Pemantauan (X ₅)	Suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif.	1. Berkelanjutan 2. Evaluasi terpisah 3. Tindak Lanjut Rekomendasi	Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang beralamatkan di Jl. Negara No.1, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2023 dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu											
		Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Pendahuluan	■											
2	Pengumpulan Data Awal	■	■	■									
3	Pengumpulan Teori	■	■	■									
4	Pembuatan Proposal			■	■	■	■						
5	Bimbingan & Penyelesaian Proposal			■	■	■	■						
6	Seminar Proposal							■	■				
7	Analisa Pengelolaan Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Bimbingan & Penyelesaian Hasil Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Sidang Skripsi												■

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tergabung pada Tim anggaran yang berjumlah 31 Dinas.

Tabel 3.3
Populasi dan Sampel Penelitian
OPD di Deli Serdang

No	Badan/Dinas/Kantor
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Inspektorat

7	Badan Kepegawaian Daerah
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Pendidikan
13	Dinas Pertanian
14	Dinas Sosial
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
19	Dinas Ketenagakerjaan
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
21	Badan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
22	Badan Pendapatan Daerah
23	Dinas Ketahanan Pangan
24	Satuan Polisi Pamong Praja
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Dinas Kelautan dan Perikanan
28	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29	Badan Sekretariat Daerah
30	Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
31	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang

Sumber : OPD Deli Serdang, diolah (2022)

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Penulis menggunakan model *probability sampling* atau *random sampling* yaitu *accidental sampling* yaitu penyebaran kuesioner ke seluruh populasi dan melihat dari 31 Dinas yang merespon kuesioner tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2018, hal. 194). Dalam penelitian ini, penulis mengambil masing-masing 2 sampel dari 31 Dinas yang bersedia untuk diwawancarai.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat menggunakan kuesioner online. Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan nilai apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan / pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2018, hal. 199).

Skala yang dipakai dalam penyusunan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam pengukurannya,

setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Skala Likert

No.	Notasi	Pertanyaan	Bobot
1	SB	Sangat Baik	5
2	B	Baik	4
3	CB	Cukup Baik	3
4	KB	Kurang Baik	2
5	TB	Tidak Baik	1

Sebelum kuesioner disebarakan oleh peneliti kepada responden, maka kuesioner perlu diuji terlebih dahulu agar data yang akan dianalisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan ujiinstrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Artinya, instrumen pada kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya cukup layak atau tidak, sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu

$$R_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

n = banyaknya pasangan pengamatan
 $\sum x_i$ = jumlah pengamatan variabel x
 $\sum y_i$ = jumlah pengamatan variabel y
 $(\sum x_i^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel
 $x(\sum y_i^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel
 $y(\sum x_i)^2$ = kuadrat jumlah pengamatan variabel x
 $(\sum y_i)^2$ = kuadrat jumlah pengamatan variabel y
 $\sum x_i y_i$ = jumlah hasil kali variabel x dan y

Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi person dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 36 pegawai yang tersebar di SKPD Deli Serdang. Dimana $n = 31$ pada tingkat signifikan 5 % dilakukan pengukuran dengan SPSS versi 21.0 akan dilihat tingkat signifikan atas semua pernyataan. Pengujian validitas tiap instrument bebas dengan cara mengkorelasikan tiap butir pertanyaan tersebut. Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak valid dengan membandingkan r_{hitung} terhadap $r_{tabel} = 0.220$ (lihat r tabel untuk $N=36$ dengan signifikansi 1 arah 0,05), dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$.

1) Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas , maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5 Uji Validitas

Variabel	Item Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Lingkungan Pengendalian (X₁)	Soal 1	0.495	0,220	Valid
	Soal 2	0.711	0,220	Valid
	Soal 3	0.774	0,220	Valid
	Soal 4	0.538	0,220	Valid
	Soal 5	0.684	0,220	Valid
Pengendalian	Soal 1	0.785	0,220	Valid

Resiko (X₂)	Soal 2	0.800	0,220	Valid
	Soal 3	0.807	0,220	Valid
	Soal 4	0.758	0,220	Valid
	Soal 5	0.306	0,220	Valid
Kegiatan Pengendalian (X₃)	Soal 1	0.765	0,220	Valid
	Soal 2	0.753	0,220	Valid
	Soal 3	0.750	0,220	Valid
	Soal 4	0.724	0,220	Valid
	Soal 5	0.788	0,220	Valid
Informasi dan Komunikasi (X₄)	Soal 1	0.869	0,220	Valid
	Soal 2	0.776	0,220	Valid
	Soal 3	0.674	0,220	Valid
	Soal 4	0.833	0,220	Valid
	Soal 5	0.604	0,220	Valid
Pemantauan (X₅)	Soal 1	0.770	0,220	Valid
	Soal 2	0.713	0,220	Valid
	Soal 3	0.806	0,220	Valid
	Soal 4	0.629	0,220	Valid
	Soal 5	0.801	0,220	Valid
Pengelolaan Keuangan (Y)	Soal 1	0.836	0,220	Valid
	Soal 2	0.731	0,220	Valid
	Soal 3	0.731	0,220	Valid
	Soal 4	0.603	0,220	Valid
	Soal 5	0.566	0,220	Valid

Sumber : Data SPSS , diolah (2023)

Dari data uji validitas di atas dapat kita lihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari seluruh variabel memiliki nilai *Corrected item-total correlation* atau kita sebut dengan r hitung lebih besar dari r tabel (0,220), dengan demikian seluruh butir pertanyaan variabel pemantauan dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang diteliti. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Suatu kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu

(Ghozali, 2011). Pengukuran uji reliabilitas terhadap kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik *cronbach alpha* (α) dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Reliabilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* (α) dengan rumus alpha (α) adalah sebagai berikut :

$$r_{ac} = \left(\frac{K}{k-1} \right) \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{ac} = koefisien reabilitas alpha cronbach

k = banyak butir per item

$\sum \sigma b^2$ = jumlah varians butir

σt^2 = jumlah varians total

Menentukan reliabilitas dari alat ukur dapat dilihat dari nilai alfa jika nilai alfa lebih besar dari nilai rtabel, skala dikelompok ke dalam lima kelas dengan renege yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat di interprestasikan sebagai berikut :

- a. Nilai *alpha Cronbach* 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliable
- b. Nilai *alpha Cronbach* 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliable
- c. Nilai *alpha Cronbach* 0,41 s.d. 0,60, berarti cukup reliable
- d. Nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d. 0,80, berarti reliable
- e. Nilai *alpha Cronbach* 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliable

(Juliansyah Noor, 2012 : 165)

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap butir pernyataan yang termasuk dalam kategori *valid*. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba instrument sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien *reliabilitas* bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,600. Tabel menunjukkan hasil uji reabilitas untuk empat variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	N of item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	5	0,754	Reliabel
Penilaian Resiko	5	0,768	Reliabel
Kegiatan Pengendalian	5	0,794	Reliabel
Sistem Informasi	5	0,790	Reliabel
Pemantauan	5	0,791	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah	7	0,752	Reliabel

Sumber : SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya nilai *Cronbachs Alpha* seluruh variabel dalam uji reliabilitas memiliki nilai lebih besar dari 0,600 (standar normal pengujian reliabilitas), dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran data variabel dinyatakan terpercaya atau reliabel.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsi suatu data

yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

2. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti dengan maksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2018).

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + e$$

Dimana :

Y	= Variabel Dependen
a	= konstanta
X ₁	= Lingkungan Pengendalian
X ₂	= Penilaian Resiko
X ₃	= Kegiatan Pengendalian
X ₄	= Informasi dan Komunikasi
X ₅	= Pemantauan
e	= Standard Error

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Penyimpangan asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji

normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Salah satu metode ujinya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik secara normal plot atau grafik histogram, dengan acuan sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan analisis grafik, uji normalitas dapat juga dilihat dengan analisis secara statistik dengan Uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan ketentuan jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel lebih kecil dari nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$) yang telah ditetapkan maka data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016).

Uji multikolinearitas pada penelitian dilakukan dengan matriks kolerasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks kolerasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance- nya. Apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis terlepas dari gejala multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas juga dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan ToleranceValue. Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah: Mempunyai Tolerance Value ≥ 0.10 atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 (Ghozali, 2016).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Dan jika variance berbeda, disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat uji grafik plot. Uji grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Dengan dasar analisis (Ghozali, 2016) :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson (DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai DW hitung dengan DW tabel. Jika nilai DW hitung $>$ DW table maka tidak terdapat autokorelasi dalam modle tersebut (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada ketentuan berikut:

Tabel 3.7 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: (Ghozali, 2016)

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji t ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-F)

Untuk menguji nyata atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara serentak digunakan Uji F yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian Hipotesis:

- a. Jika tabel anova memiliki nilai signifikansi $>$ dari 0,05 dan $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika tabel anova memiliki nilai signifikansi $<$ dari 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

c. Uji Determinan (R^2)

Uji determinan (R^2) pada intinya mengukur ketepatan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap hasil yang diperoleh. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Rumus untuk mengukur besarnya proporsi adalah:

$$KD = R^2 \times 100 \%$$

Dimana: KD = Kofesien Determinan.

R^2 = Kuadrat Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tergabung pada Tim anggaran yang berjumlah 31 dinas.

4.1.2. Tingkat Pengembalian Angket

Adapun angket kuesioner yang disebar adalah sebanyak 62 angket kuesioner, dengan rincian setiap Organisasi Perangkat Daerah di sebar 2 angket kuesioner, dan yang kembali atau diisi sejumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 36 angket kuesioner.

Tabel 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner disebar	62	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	(26)	41,9%
3	Kuesioner terisi	36	58,1%

4.1.3. Deskripsi Responden

a) Demografi Responden

Peneliti melakukan penyebaran angket kepada seluruh pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di OPD Deli Serdang yang tergabung pada Tim anggaran, Adapun kuesioner yang terisi berjumlah 36 (tiga puluh enam) data responden.

Adapun karakteristik responden di jelaskan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	14	38.9	38.9	38.9
Valid Perempuan	22	61.1	61.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya jenis kelamin terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah perempuan dengan besaran nilai 61,1% atau sebanyak 22 orang, sedangkan laki-laki sebesar 38,9% atau sebanyak 14 orang.

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Usia
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<30 Tahun	8	22.2	22.2	22.2
30-35 Tahun	16	44.4	44.4	66.7
Valid 36-40 Tahun	7	19.4	19.4	86.1
>40 Tahun	5	13.9	13.9	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya usia responden yang terbanyak (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 30-35 tahun sebanyak 16 orang, usia <30 tahun sebanyak 8 orang, usia 36-40 tahun sebanyak 7 orang dan usia >40 tahun sebanyak 5 orang.

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<2 Tahun	17	47.2	47.2	47.2
2-5 Tahun	9	25.0	25.0	72.2
>5 Tahun	10	27.8	27.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya lama bekerja (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang bekerja <2 Tahun sebanyak 17 orang, kemudian >5 Tahun sebanyak 10 orang, dan 2-5 Tahun sebanyak 9 orang.

b) Deskripsi Jawaban Responden

Adapun sebelum melakukan analisis data peneliti melakukan penilaian skala interval dalam menilai jawaban responden, adapun skala interval sebagai berikut

Adapun interval dari skala likert adalah sebagai berikut :

Nilai tertinggi = Skor tertinggi x Jumlah Responden

$$\begin{aligned} \text{Nilai Tertinggi} &= 5 \times 36 \\ &= 180 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai terendah} &= 1 \times 36 \\ &= 36 \end{aligned}$$

Kemudian,

$$\begin{aligned} \text{skor tertinggi dari variabel} &= \text{nilai tertinggi} \times \text{jumlah pernyataan} \\ &= 180 \times 5 \\ &= 900 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{skor terendah dari variabel} &= \text{nilai terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 36 \times 5 \\ &= 180 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dengan rumus interval} &= (\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}) / \text{jumlah skala} \\ &= (900-180)/5 \\ &= 144 \end{aligned}$$

Adapun tabel interval untuk 5 tingkatan skala likert sebagai berikut :

Interval Pernyataan	Keterangan
144-180	Sangat Baik
113-143	Baik
94-112	Cukup Baik
65-93	Kurang Baik
36-64	Tidak Baik

Untuk melihat jawaban responden atas kuesioner yang telah diisi, maka peneliti melakukan tabulasi data untuk di deskripsikan sebagaimana tabel di bawah ini :

1) Variabel Lingkungan Pengendalian (X_1)

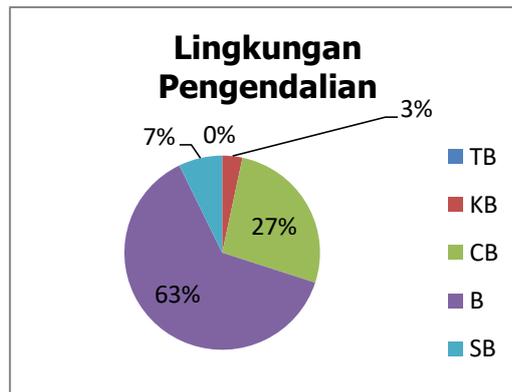
Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya.

Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Variabel Lingkungan Pengendalian (X_1)

Pernyataan	Tanggapan Responden										Nilai Skor	
	SB		B		CB		KB		TB		Nilai	Kategori
	5	4	3	2	1							
Pemerintah daerah harus memiliki integritas dan nilai-nilai etika.	F	2	F	21	F	12	F	1	F	0	132	Baik
	%	5,6	%	58,3	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Pemerintah daerah harus memiliki komitmen terhadap kompetensi.	F	2	F	22	F	10	F	2	F	0	132	Baik
	%	5,6	%	61,1	%	27,8	%	5,6	%	0,0		
Pemerintah daerah harus mempunyai falsafah manajemen dan gaya operasi.	F	2	F	23	F	10	F	1	F	0	134	Baik
	%	5,6	%	63,9	%	27,8	%	2,8	%	0,0		
Dalam instansi harus memiliki dewan komisaris atau komite audit atau yang setara dengan dewan komisaris atau komite audit.	F	4	F	27	F	4	F	1	F	0	142	Baik
	%	11,1	%	75,0	%	11,1	%	2,8	%	0,0		
Adanya pelimpahan tugas dan wewenang dalam instansi.	F	3	F	20	F	12	F	1	F	0	131	Baik
	%	8,3	%	55,6	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Skor										671		
Rata-rata variable										134,2		
Kategori										Baik		

Sumber : Data SPSS (2023)

Adapun data tersebut juga dapat dijelaskan melalui diagram pie sebagai berikut :



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya tanggapan responden pada pertanyaan di variabel lingkungan pengendalian berada dalam kategori baik dengan jumlah persentase sebesar 63%. Sisanya responden yang menanggapi tidak baik sebesar 0%, responden yang menanggapi kurang baik sebesar 3%, responden yang menanggapi cukup baik sebesar 27% dan responden yang menanggapi sangat baik sebesar 7%.

2) Variabel Penilaian Resiko (X_2)

Penilaian resiko merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hal-hal terburuk yang tidak diinginkan. Penilaian resiko merupakan sebuah tahapan dalam pengendalian intern pemerintah dengan melakukan identifikasi resiko, menilai faktor resiko dan analisis resiko.

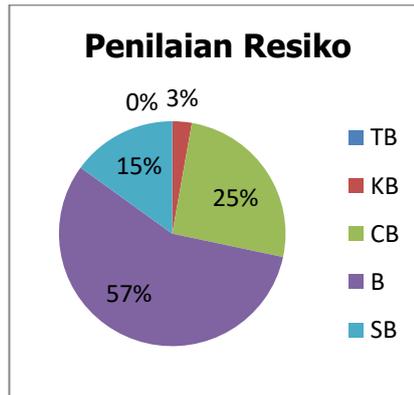
Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi.

Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Variabel Penilaian Resiko (X₂)

Pernyataan	Tanggapan Responden										Nilai Skor	
	SB		B		CB		KB		TB		Nilai	Kategori
	5	4	3	2	1							
Adanya penilaian terhadap risiko.	F	2	F	22	F	12	F	1	F	0	134	Baik
	%	5,6	%	58,3	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Adanya penetapan metode pengukuran.	F	1	F	25	F	10	F	2	F	0	136	Baik
	%	2,8	%	61,1	%	27,8	%	5,6	%	0,0		
Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi risiko.	F	2	F	16	F	15	F	1	F	0	131	Baik
	%	5,6	%	63,9	%	27,8	%	2,8	%	0,0		
Adanya penetapan pengendalian internal.	F	2	F	24	F	8	F	1	F	0	140	Baik
	%	5,6	%	75,0	%	11,1	%	2,8	%	0,0		
Didalam instansi harus terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal	F	20	F	15	F	1	F	1	F	0	132	Baik
	%	55,6	%	55,6	%	2,8	%	2,8	%	0,0		
Skor										673		
Rata-rata variable										135,2		
Kategori										Baik		

Sumber : Data SPSS (2023)

Adapun data tersebut juga dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut :



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya tanggapan responden pada pertanyaan di variabel penilaian risiko berada dalam kategori baik dengan jumlah persentase sebanyak 57%.

3) Variabel Kegiatan Pengendalian (X₃)

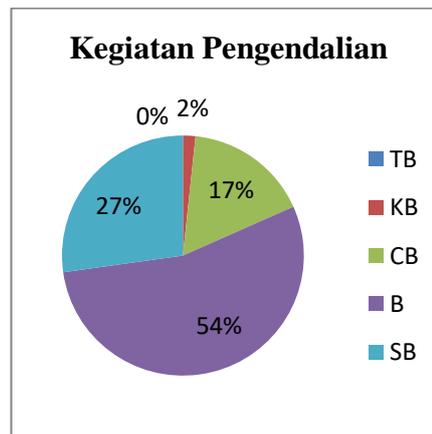
Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada

Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Variabel Kegiatan Pengendalian (X₃)

Pernyataan	Tanggapan Responden										Nilai Skor	
	SB		B		CB		KB		TB		Nilai	Kategori
	5	4	3	2	1							
Pemisahan kewajiban di instansi harus diterapkan secara memadai	F	2	F	21	F	12	F	1	F	0	134	Baik
	%	5,6	%	58,3	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Di dalam instansi haruslah ada otorisasi	F	2	F	22	F	10	F	2	F	0	136	Baik
	%	5,6	%	61,1	%	27,8	%	5,6	%	0,0		
Dilakukannya pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.	F	2	F	23	F	10	F	1	F	0	131	Baik
	%	5,6	%	63,9	%	27,8	%	2,8	%	0,0		
Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.kegiatan	F	4	F	27	F	4	F	1	F	0	140	Baik
	%	11,1	%	75,0	%	11,1	%	2,8	%	0,0		
Pemisahan kewajiban di instansi harus diterapkan secara memadai.	F	3	F	20	F	12	F	1	F	0	132	Baik
	%	8,3	%	55,6	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Skor											673	
Rata-rata variable											135,2	
Kategori											Baik	

Sumber : Data SPSS (2023)

Adapun data tersebut juga dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut :



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya tanggapan responden pada pertanyaan di variabel kegiatan pengendalian berada dalam kategori baik dengan jumlah persentase sebanyak 54%.

4) Variabel Sistem Informasi (X₄)

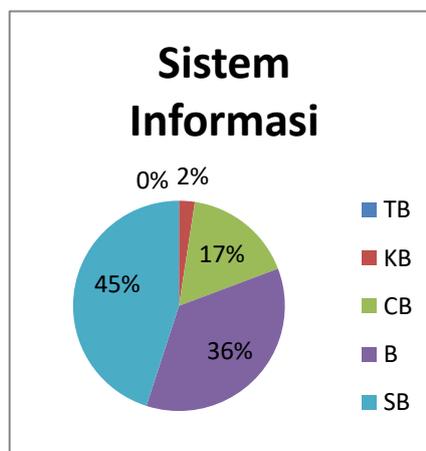
Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik.

Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Variabel Sistem Informasi (X₄)

Pernyataan	Tanggapan Responden										Nilai Skor	
	SB		B		CB		KB		TB		Nilai	Kategori
	5	4	3	2	1							
Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik	F	2	F	21	F	12	F	1	F	0	134	Baik
	%	5,6	%	58,3	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Sistem informasi yang dipakai instansi haruslah berfungsi dengan baik.	F	2	F	22	F	10	F	2	F	0	136	Baik
	%	5,6	%	61,1	%	27,8	%	5,6	%	0,0		
Di dalam instansi Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan.	F	2	F	23	F	10	F	1	F	0	131	Baik
	%	5,6	%	63,9	%	27,8	%	2,8	%	0,0		
Sistem informasi telah membantu pekerjaan di instansi ini	F	4	F	27	F	4	F	1	F	0	140	Baik
	%	11,1	%	75,0	%	11,1	%	2,8	%	0,0		
Sistem informasi telah berjalan baik di instansi ini	F	3	F	20	F	12	F	1	F	0	132	Baik
	%	8,3	%	55,6	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Skor											673	
Rata-rata variable											135,2	
Kategori											Baik	

Sumber : Data SPSS (2023)

Adapun data tersebut juga dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut :



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya tanggapan responden pada pertanyaan di variabel informasi dan komunikasi berada dalam kategori sangat baik dengan persentase sebanyak 45%.

5) Variabel Pemantauan (X_5)

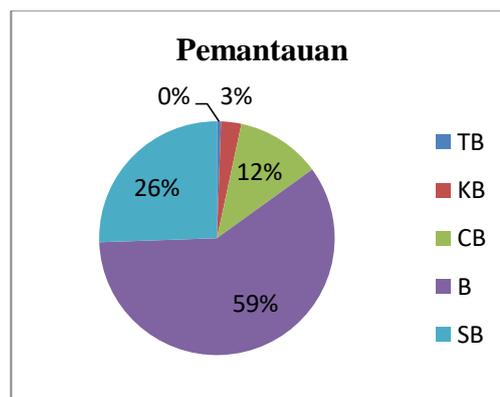
Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif.

Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban Variabel Pemantauan (X_5)

Pernyataan	Tanggapan Responden										Nilai Skor	
	SB		B		CB		KB		TB		Nilai	Kategori
	5	4	3	2	1							
Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.kegiatan	F	2	F	21	F	12	F	1	F	0	134	Baik
	%	5,6	%	58,3	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Pemantauan dilaksanakan secara periodik.	F	2	F	22	F	10	F	2	F	0	136	Baik
	%	5,6	%	61,1	%	27,8	%	5,6	%	0,0		
Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal.	F	2	F	23	F	10	F	1	F	0	131	Baik
	%	5,6	%	63,9	%	27,8	%	2,8	%	0,0		
Instansi telah melakukan pemantauan yang baik	F	4	F	27	F	4	F	1	F	0	140	Baik
	%	11,1	%	75,0	%	11,1	%	2,8	%	0,0		
Pemantauan sangat berguna dalam peningkatan kinerja	F	3	F	20	F	12	F	1	F	0	132	Baik
	%	8,3	%	55,6	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Skor											673	
Rata-rata variable											135,2	
Kategori											Baik	

Sumber : Data SPSS (2023)

Adapun data tersebut juga dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut :



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya tanggapan responden pada pertanyaan di variabel pemantauan berada dalam kategori baik dengan jumlah persentase sebanyak 59%.

6) Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

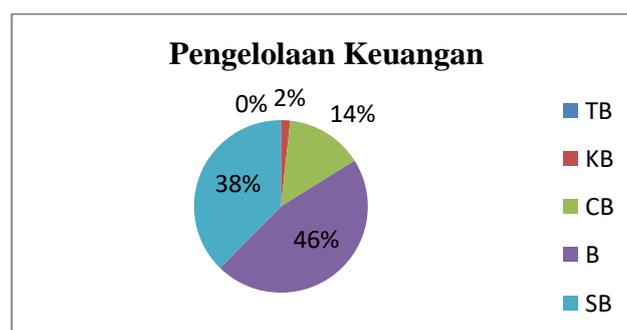
Pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan penting dalam mengelola keuangan dan memastikan bahwa tujuan anggaran tercapai.

Tabel 4.10 Deskripsi Jawaban Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pernyataan	Tanggapan Responden										Nilai Skor	
	SB		B		CB		KB		TB		Nilai	Kategori
	5	4	3	2	1							
kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif	F	2	F	21	F	12	F	1	F	0	134	Baik
	%	5,6	%	58,3	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
tujuan rencana kerja dan anggaran telah disesuaikan dengan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	F	2	F	22	F	10	F	2	F	0	136	Baik
	%	5,6	%	61,1	%	27,8	%	5,6	%	0,0		
pelaksanaan anggaran secara efektif ditentukan oleh usaha yang dikerahkan, kemampuan kualitas seseorang, partisipasi, penetapan sasaran, serta persepsi seseorang tentang tugas dan kewajibannya	F	2	F	23	F	10	F	1	F	0	131	Baik
	%	5,6	%	63,9	%	27,8	%	2,8	%	0,0		
Pada instansi tempat Saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas dan spesifik	F	4	F	27	F	4	F	1	F	0	140	Baik
	%	11,1	%	75,0	%	11,1	%	2,8	%	0,0		
Pelaporan anggaran rutin dilaksanakan setiap tahun dan dapat dievaluasi	F	3	F	20	F	12	F	1	F	0	132	Baik
	%	8,3	%	55,6	%	33,3	%	2,8	%	0,0		
Skor										673		
Rata-rata variable										135,2		
Kategori										Baik		

Sumber : Data SPSS (2023)

Adapun data tersebut juga dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut :



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya tanggapan responden pada pertanyaan di variabel pengelolaan keuangan berada dalam kategori baik dengan jumlah persentase sebanyak 46%.

5. Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan dalam analisis regresi berganda. Dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut ini dapat dilihat grafik hasil penelitian data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS 21 adalah sebagai berikut :

1) Uji Kolmogorov Smirnov

Uji Kolmogorov Smirnov bertujuan agar dalam penelitian dapat mengetahui distribusi normal atau tidak antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Maka ketentuan untuk uji Kolmogorov Smirnov ini adalah :

- a) $\text{Asymp. Sig (2-tailed)} > 0,05$ ($\alpha = 5\%$ tingkat signifikan) maka data berdistribusi normal.
- b) $\text{Asymp. Sig (2-tailed)} < 0,05$ ($\alpha = 5\%$ tingkat signifikan) maka data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.11
Uji Kolmogorov-Smirnov

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Lingkungan Pengendalian	Kegiatan Pengendalian	Sistem Informasi	Pemantauan	Pengelolaan Keuangan Daerah	Penilaian Resiko
N		36	36	36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19.2364	20.0000	19.0000	20.1818	27.9091	19.4182
	Std. Deviation	2.09906	2.34126	2.29331	2.42740	2.60536	1.93114
Most Extreme Differences	Absolute	.206	.191	.222	.143	.223	.251
	Positive	.128	.191	.222	.100	.138	.152
	Negative	-.206	-.136	-.191	-.143	-.223	-.251
Kolmogorov-Smirnov Z		1.525	1.416	1.649	1.060	1.654	1.859
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069	.076	.079	.212	.128	.122

a. Test distribution is Normal.

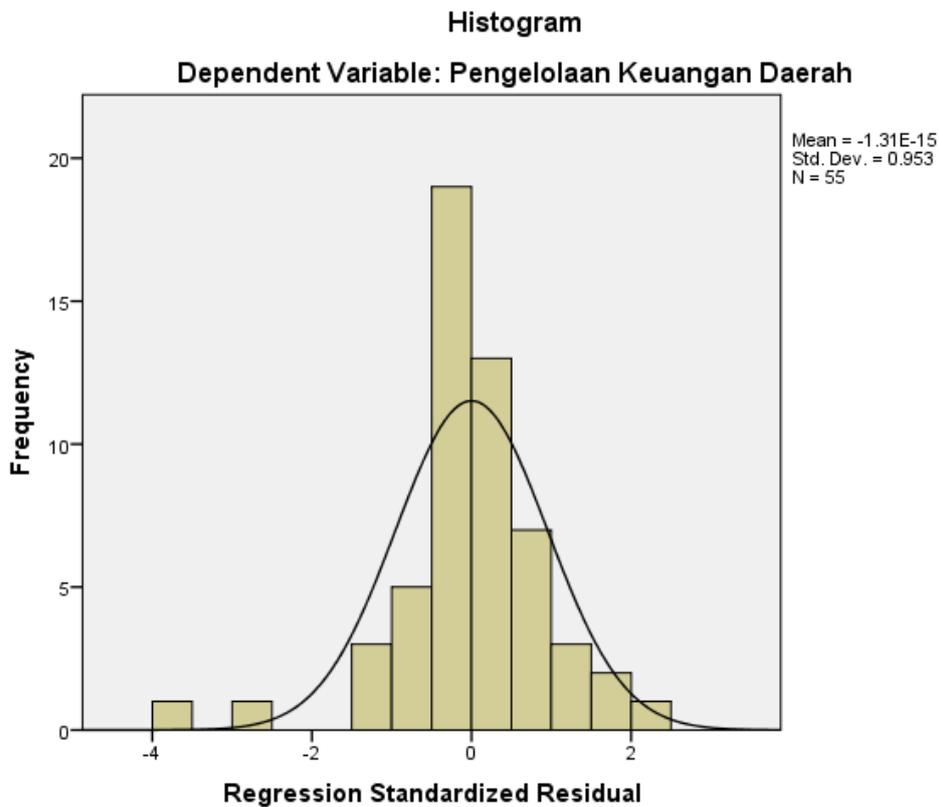
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Berdasarkan hasil uji *statistic one-sampel kolmogorov smirnov* yang terdapat pada tabel di atas dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05%* sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

2) Grafik Histogram

Histogram adalah grafik batang yang berfungsi untuk menguji apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka data akan membentuk semacam lonceng. Apabila grafik terlihat jauh dari bentuk lonceng maka data tidak berdistribusi normal.



Gambar 4.1
Hasil Uji Grafik Histogram
Sumber : Hasil SPSS 21.0

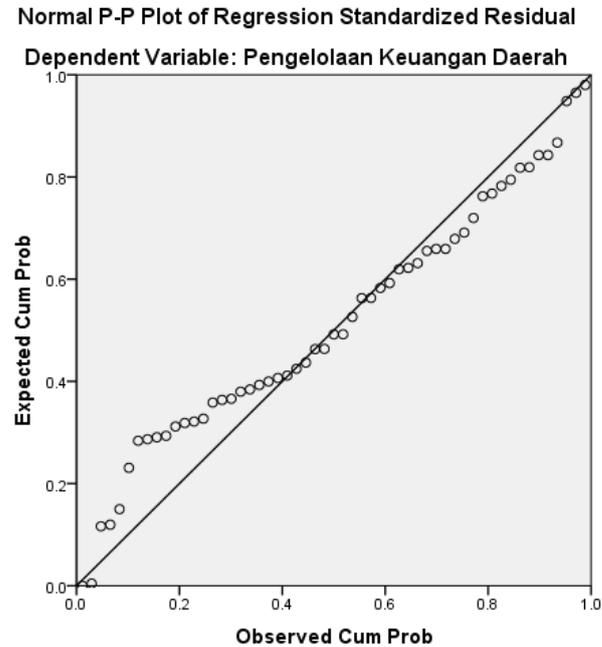
Grafik histogram pada gambar diatas menunjukkan pola distribusi normal karena memiliki kecenderungan yang berimbang, baik pada sisi kiri maupun pada sisi kanan dan kurva membentuk lonceng dengan hampir sempurna.

3) Uji Normal P-Plot of *Regression Standarized residual*

Uji ini digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat, apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal tersebut.

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.2
Hasil Uji P-Plot
Sumber : Hasil SPSS 21.0

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat diketahui hasil dari pengujian normalitas bahwa data menyebar disekitar diagram dengan titik – titiknya yang mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal dan uji normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolineritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflating Factor* (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolinieritas yang serius.
- b) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

Tabel 4.12
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)					
1					
Lingkungan Pengendalian	.644	.188	.130	.359	2.787
Penilaian Resiko	.700	.292	.207	.277	3.611
Kegiatan Pengendalian	.109	.077	.052	.847	1.181
Sistem Informasi	.635	.116	.080	.306	3.273
Pemantauan	.246	.132	.090	.847	1.180

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel IV.6 diatas menunjukkan hasil uji multikolinieritas bahwa nilai VIF untuk masing – masing variabel adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai VIF Lingkungan Pengendalian (X1) sebesar $2,787 < 5$ maka variabel Lingkungan Pengendalian dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
- 2) Nilai VIF Penilaian Resiko (X2) sebesar $3,611 < 5$ maka variabel Penilaian Resiko dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
- 3) Nilai VIF Kegiatan Pengendalian (X3) sebesar $1,181 < 5$ maka variabel Penilaian Resiko dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
- 4) Nilai VIF Sistem Informasi (X4) sebesar $3,273 < 5$ maka variabel Penilaian Resiko dinyatakan bebas dari multikolinieritas.

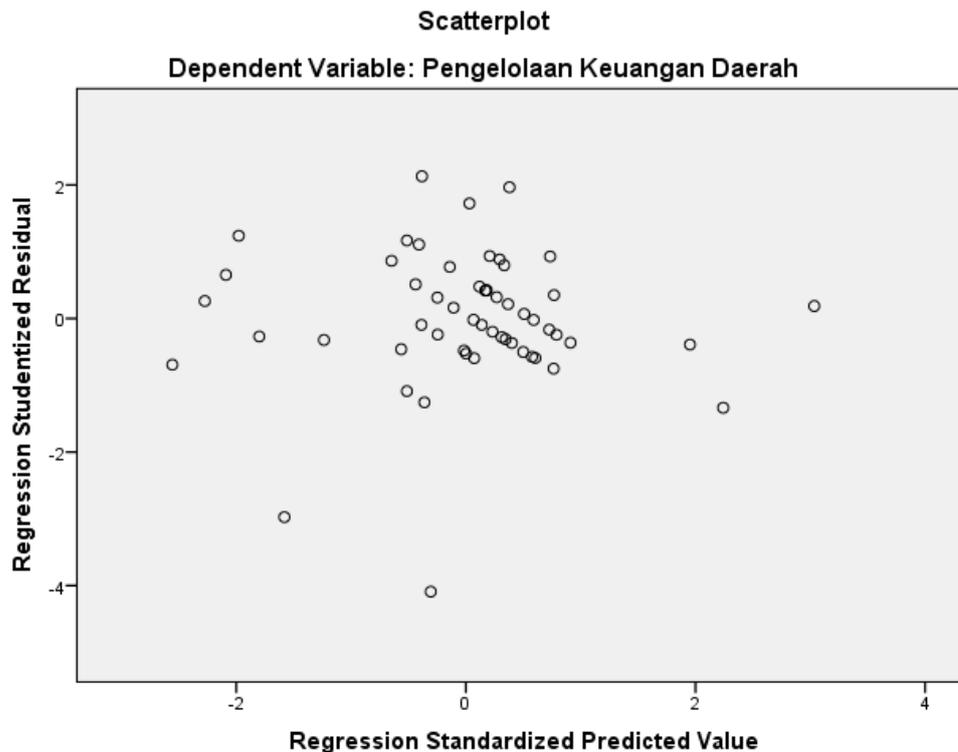
- 5) Nilai VIF Pemantauan (X5) sebesar $1,180 < 5$ maka variabel Penilaian Resiko dinyatakan bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot.

Dengan dasar analisis :

- 1) Jika ada pola tertentu (titik – titik) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari gambar 4.3 diatas terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang teratur. Serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*). Uji autokorelasi dapat dilihat menggunakan uji *statistic Durbin-Watson*. Dengan kriteria pengujian :

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Tabel 4.13
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	49 ^a	.000	1.615

a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi, Penilaian Resiko

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel IV.7 diatas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,615. Ketentuan, jika nilai Durbin – Watson berada diantara 1,55 sampai dengan 2,46 menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi (Algifari, 1997 dalam Hayati, 2010). Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai Durbin – Watson sebesar 1,615 hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

Berdasarkan uji asumsi klasik yang dilakukan dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal.

6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melihat seberapa besar koefisien regresi yang berpengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dengan model persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pengelola Keuangan Daerah

α = konstanta

X_1 = Lingkungan Pengendalian

X_2 = Penilaian Resiko

X_3 = Kegiatan Pengendalian

X_4 = Sistem Informasi

X_5 = Pemantauan

Berikut adalah hasil perhitungan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21.0.

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.896	3.482		1.694	.097
1					
Lingkungan Pengendalian	.269	.201	.217	1.338	.000
Penilaian Resiko	.532	.249	.394	2.135	.000
Kegiatan Pengendalian	.063	.117	.057	2.540	.002
Sistem Informasi	.164	.200	.144	2.820	.000
Pemantauan	.105	.113	.098	2.929	.000

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai – nilai sebagai berikut :

Konstant α	= 5,896
(X1)	= 0.269
(X2)	= 0.532
(X3)	= 0.063
(X4)	= 0.164
(X5)	= 0.105

Dari hasil tersebut, maka persamaan regresi linear berganda yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$Y = 5,896 + 0.269 + 0.532 + 0.063 + 0.164 + 0.105 + e$$

Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 5,869 menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan, maka Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 5,869.
- Nilai koefisien regresi Lingkungan Pengendalian sebesar 0.269 atau 26,9% artinya bahwa setiap kenaikan Lingkungan Pengendalian maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 26,9% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.
- Nilai koefisien regresi Penilaian Resiko sebesar 0.532 atau 53,2% artinya bahwa setiap kenaikan Penilaian Resiko maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 53,2% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.
- Nilai koefisien regresi Kegiatan Pengendalian sebesar 0.063 atau 6,3% artinya bahwa setiap Kegiatan Pengendalian maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 6,3% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.

- e) Nilai koefisien regresi Sistem Informasi sebesar 0.164 atau 16,4% artinya bahwa setiap kenaikan Sistem Informasi maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 16,4% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.
- f) Nilai koefisien regresi Pemantauan sebesar 0.164 atau 16,4% artinya bahwa setiap kenaikan Pemantauan maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 16,4% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.

7. Pengujian Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) yaitu :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Dari hasil pengelolaan data yang dilakukan dengan SPSS hasil yang ditunjukkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.896	3.482		1.694	.097
Lingkungan Pengendalian	.269	.201	.217	1.338	.000
Penilaian Resiko	.532	.249	.394	2.135	.000
Kegiatan Pengendalian	.063	.117	.057	2.540	.002
Sistem Informasi	.164	.200	.144	2.820	.000
Pemantauan	.105	.113	.098	2.929	.000

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Hasil pengujian statistic dari tabel IV.8 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Nilai Perusahaan Pengelola Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Lingkungan Pengendalian secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Pengelola Keuangan Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteri pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Lingkungan Pengendalian terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Lingkungan Pengendalian (X1) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. 0.000 < probabilitas 0.05, maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya ada pengaruh Lingkungan Pengendalian (X1) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

b. Pengaruh Penilaian Resiko Terhadap Pengelola Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah *Penilaian Resiko* secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Pengelola Keuangan Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteri pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap
- b. variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- c. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Penilaian Resiko terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Penilaian Resiko (X2) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. 0.000 < probabilitas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Penilaian Resiko (X2) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

c. Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Kegiatan Pengendalian secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap

Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $<$ probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $>$ probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Kegiatan Pengendalian (X3) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. 0.002 $<$ probabilitas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Kegiatan Pengendalian (X3) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

d. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Informasi secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $<$ probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.

- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Sistem Informasi terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Sistem Informasi (X4) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. 0.000 < probabilitas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Sistem Informasi (X4) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

e. Pengaruh Pemantauan Terhadap Pengelola Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Pemantauan secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Pengelola Keuangan Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteri pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Pemantauan terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Pemantauan (X5) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. 0.000 < probabilitas 0.05, maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Pemantauan (X5) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

b) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y) .

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) yaitu :

- a. Jika nilai signifikansi (Sig) < 0.05, maka hipotesis diterima.
- b. Jika nilai signifikansi (Sig) > 0.05, maka hipotesis ditolak.

Dari hasil pengelolaan data yang dilakukan ditunjukkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	197.004	5	39.401	11.387	.000 ^b
Residual	169.541	49	3.460		
Total	366.545	54			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pemantauan, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi, Penilaian Resiko

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < 0.05$, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F. dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah.

8. Koefisien Determinasi

R-Square digunakan untuk melihat variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Dalam kegunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam presentase (%). Maka dapat diketahui uji determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.733 ^a	.537	.490	1.86011	.537	11.387	5

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel diatas menunjukkan nilai *R-Square* dalam penelitian ini sebesar 0.537 atau 53,7% yang berarti bahwa presentase pengaruh variabel bebas atau Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan terhadap Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar 53,7% sedangkan selebihnya 46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pengaruh mengenai hasil penemuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut adalah pembahasan dalam pengaruh temuan penelitian ini yang harus mampu menjawab segala pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk nilai Lingkungan Pengendalian terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Lingkungan Pengendalian (X1) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya ada pengaruh Lingkungan Pengendalian (X1) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian dapat dilakukan dengan cara penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka pengelolaan keuangan daerah akan mendapatkan dampak yang baik sehingga pengelolaan keuangan bisa berjalan efektif.

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi awal untuk pengembangan sistem pengendalian internal dengan menyediakan disiplin dan struktur yang bersifat fundamental. Hal ini sangat menentukan warna dari sebuah perusahaan dan memberi dasar bagi cara pandang terhadap risiko dari setiap orang di dalam perusahaan tersebut. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu perusahaan dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pentingnya sebuah pengendalian. (Zamzami et al. 2018)

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, prosedur, yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Inti dari keberhasilan dalam pengendalian entitas terletak pada sikap manajemen puncak sangat fokus terhadap pengendalian, maka anggota entitas lainnya juga akan bersikap demikian. (Hery, 2017)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berdasarkan pertanyaan tentang Pemerintah daerah harus memiliki integritas dan nilai-nilai etika. mayoritas responden menjawab baik sebesar 58,3% atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan tentang Pemerintah daerah harus memiliki komitmen terhadap kompetensi. mayoritas responden menjawab baik sebesar 61,1 % atau sebanyak 22 orang. Berdasarkan pertanyaan Pemerintah daerah harus mempunyai falsafah manajemen dan gaya operasi. mayoritas responden menjawab baik sebesar 63,9 % atau sebanyak 23 orang. Berdasarkan pertanyaan Dalam instansi harus memiliki dewan komisaris atau komite audit atau yang setara dengan dewan komisaris atau komite audit. mayoritas responden menjawab baik sebesar 75,0 % atau sebanyak 27

orang. Berdasarkan pertanyaan Adanya pelimpahan tugas dan wewenang dalam instansi mayoritas responden menjawab baik sebesar 75 % atau sebanyak 27 orang.

Penelitian ini sejalan oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Sinambela, Saragih dan Sari (2018), Ditya dan Suryono (2012) serta Ditya dan Surjono (2012)

2. Pengaruh Penilaian Resiko terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk nilai Penilaian Resiko terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Penilaian Resiko (X2) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Penilaian Resiko (X2) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y). Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

Penilaian resiko dapat dilakukan dengan tahapan identifikasi risiko, menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko dan analisis risiko, ketika risiko-resiko dapat ditabulasi dan di analisis tentunya keuangan daerah yang dikelola akan menjadi efektif.

Penilaian resiko merupakan aktivitas yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, jika perusahaan sering mengalami kesulitan dalam menagih piutang usaha, maka perusahaan harus menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko lebih saji piutang usaha. (Hery, 2019) Penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. penilaian risiko pada dasarnya adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Tujuan penilaian risiko adalah menetapkan kemungkinan yang dapat terjadi dan dampak dari suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan agar dapat dilakukan penanganan terhadap risiko secara tepat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berdasarkan pertanyaan Adanya penilaian terhadap risiko. mayoritas responden menjawab baik sebesar 61,1 % atau sebanyak 22 orang. Berdasarkan pertanyaan Adanya penetapan metode pengukuran mayoritas responden menjawab baik sebesar 69,4 % atau sebanyak 25 orang. Berdasarkan pertanyaan Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi risiko. mayoritas responden menjawab baik sebesar 44,4 % atau sebanyak 16 orang.. Berdasarkan pertanyaan Adanya penetapan pengendalian internal. mayoritas responden menjawab baik sebesar 66,7 % atau sebanyak 24 orang. Berdasarkan pertanyaan Didalam instansi harus terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal. mayoritas responden menjawab baik sebesar 41,7 % atau sebanyak 15 orang.

Penelitian ini sejalan oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016), Ditya dan Surjono (2012) dan Sinambela, Saragih dan Sari (2018).

3. Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk nilai Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Kegiatan Pengendalian (X3) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.002 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Kegiatan Pengendalian (X3) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur. Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk

menangulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Berdasarkan pertanyaan Pemisahan kewajiban di instansi harus diterapkan secara memadai mayoritas responden menjawab baik sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan Di dalam instansi haruslah ada otorisasi mayoritas responden menjawab baik sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan Dilakukannya pengendalian fisik atas aktiva dan catatan mayoritas responden menjawab baik sebesar 61,1 % atau sebanyak 22 orang. Berdasarkan pertanyaan Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.kegiatan mayoritas responden menjawab baik sebesar 63,9 % atau sebanyak 23 orang. Berdasarkan pertanyaan Pemisahan kewajiban di instansi harus diterapkan secara memadai. mayoritas responden menjawab kurang baik sebesar 47,2 % atau sebanyak 17 orang.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Sinambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012)

4. Pengaruh Sistem Informasi terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk nilai Sistem Informasi terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Sistem Informasi (X4) adalah sebesar 0.000. Karena nilai

Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Sistem Informasi (X4) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah, hal ini dapat dilakukan ketika informasi dan komunikasi pada instansi dapat dilaksanakan dengan baik.

Informasi dan Komunikasi: Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses

penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertanyaan Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik. mayoritas responden menjawab baik sebesar 69,4 % atau sebanyak 25 orang. Berdasarkan pertanyaan Sistem informasi yang dipakai instansi haruslah berfungsi dengan baik. mayoritas responden menjawab baik sebesar 72,2 % atau sebanyak 26 orang. Berdasarkan pertanyaan Di dalam instansi Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. mayoritas responden menjawab baik sebesar 55,6 % atau sebanyak 20 orang. Berdasarkan pertanyaan Sistem informasi telah membantu pekerjaan di instansi ini mayoritas responden menjawab baik sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan Sistem informasi telah berjalan baik di instansi ini mayoritas responden menjawab baik sebesar 47,2 % atau sebanyak 17 orang.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Nambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012)

5. Pengaruh Pemantauan terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga

merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud.

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Untuk nilai Pemantauan terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Pemantauan (X5) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Pemantauan (X5) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertanyaan Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan mayoritas responden menjawab baik sebesar 61,1 % atau sebanyak 22 orang. Berdasarkan pertanyaan Pemantauan dilaksanakan secara periodik mayoritas responden menjawab baik sebesar 66,7 % atau sebanyak 24 orang. Berdasarkan pertanyaan Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal. mayoritas responden menjawab baik sebesar 58,3 %

atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan Instansi telah melakukan pemantauan yang baik mayoritas responden menjawab baik sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan Pemantauan sangat berguna dalam peningkatan kinerja mayoritas responden menjawab baik sebesar 52,8 % atau sebanyak 19 orang.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh nambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012)

6. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < 0.05$, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F. dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah.

Secara simultan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian berarti Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian berpengaruh dengan arah positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
2. Penilaian resiko berpengaruh dengan arah positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa Penilaian resiko yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
3. Aktivitas Pengendalian berpengaruh dengan arah positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa Aktivitas pengendalian yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
4. Sistem informasi berpengaruh dengan arah positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa Sistem informasi yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
5. Pemantauan berpengaruh dengan arah positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Deli Serdang, hal ini menunjukkan bahwa

Pemantauan yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

6. Pengaruh variabel bebas atau Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan terhadap Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar 53,7% sedangkan selebihnya 46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini yaitu :

1. OPD Deli Serdang sebaiknya meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, dengan cara penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif
2. OPD Deli Serdang sebaiknya meminimalisir peningkatan pelimpahan tugas dan wewenang dalam instansi guna membuat sumberdaya manusia didalam lingkungan pengendalian tersebut berjalan dengan baik tanpa ada tekanan dari factor manapun.

3. OPD Deli Serdang didalam faktor penilaian resiko sebaiknya harus lebih memfokuskan diri terhadap adanya penentuan batas dan penetapan toleransi resiko.
4. OPD Deli Serdang didalam faktor kegiatan pengendaliannya sebaiknya lebih meningkatkan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan.
5. Dalam hal penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Pengelola Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria ,S. & Fidelis A,A.. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia sub bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada Masyarakat : Renungan bagi Akuntan Pendidik*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol.05.02. hal. 18- 30
- Andini, Dewi & Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penetapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*”. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol 24 No. 1. Universitas Islam Riau.
- Cipmawati, M. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)*”. Jurnal.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat* (7th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Zulia. (2013). *“Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Keberhasilan Perusahaan (Survei Pada Usaha-Usaha Kecil Di Kota Medan)*”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol 03 No 12.
- Hanum, Zulia. (2023). *“Analisis Penetapan COGM (Cost Of Goods Manufactured) Dengan ABC (Activity Based Costing) Sebagai Metode Pengukuran Harga Jual*”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol.07 No. 01.
- Hanum, Zulia. (2023). *“Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi FEB UMSU*”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol 07 No. 01.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reuiu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 8 tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Ritonga, Pandapotan. (2017). *“Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III Medan”*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis.
- Ritonga, Pandapotan. (2017). *“Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Economic Value Added (EVA) Dan Financial Value Added (FVA) Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan”*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis.
- Ritonga, Pandapotan. (2017). *“Meningkatkan Performance BUMD Dengan Semangat Corporatization Dan Analisis Strategis Serta Transformasi Mindset”*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis.
- Ritonga, Pandapotan (2018). *“Analisis Manajemen Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO)”*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Edy Sujana, S. E. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi

Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).

Sinambela, Elizar., Saragih, Fitriani dan Sari, Eka Nurmala. 2018. *Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara*. EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No. 2, 2018

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta

Sari, E. N. (2010). Konsep Anggaran Dalam Perspektif Balance Scorecard: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(September), 119–135.

Syaifullah, Muhammad. (2010). *Kualitas Sistem Informasi Akuntansi* : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 10 (2).

Udi. K. 2017 Skripsi Akuntansi Universitas Lampung : *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Putra, Edisah Nainggolan. (2015). *Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Tingkat Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating* : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 15 (1), 97 – 101.

Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 271-282.

Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Zurriah, Rezki. (2021). *Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Nilai Perusahaan* :
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 21 (1), 101 – 106.

LAMPIRAN

[Faint signature and text]



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2579/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 8/2/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Kualitas sumber daya manusia aparatur desa relatif rendah
- Rencana Judul : 1. Pengaruh kualitas SDM dan Teknologi informasi terhadap penerapan SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010
2. Pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3. Pengaruh kualitas SDM, komitmen Organisasi, Komunikasi organisasi, dan Partisipasi anggaran terhadap kinerja satuan perangkat daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintah Daerah Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nabhilla Padma Widya Andini)

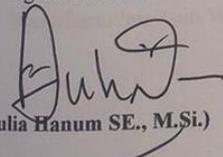


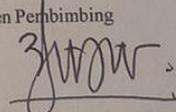
PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2579/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2022

Nama Mahasiswa : Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 8/2/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Eko Nurmato Sari, SE., M.Si., Ak., CA.

Judul Disetujui**) : Pengaruh Sistem pengendalian Intern pemerintah
Terdapat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum SE., M.Si.)

Medan, 30 Juni 2022
Dosen Pembimbing

(Dr. Eko Nurmato Sari, SE., M.Si., Ak., CA.)

Keterangan:
*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi
**) Dasi oleh Dosen Pembimbing
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ke agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2256/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 06 Muharram 1444 H
04 Agustus 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang
Jln. Negara No.1, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nabhilla Padma Widya Andini
Npm : 1805170088
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502

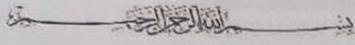




PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 26 Dzulhijjah 1443 H
26 Juli 2022 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : N A B H I L L A P A D M A W I O Y A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 8 8

Tempat, Tgl. Lahir : S E I - K A R A N G . 2 2 O K T O B E R
2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . P E T U M B U K A N S I M P A N
G . S P P . D E S A J A H A R U N . A

Tempat Penelitian : K A N T O R B U P A T I
K A B U P A T E N P E L I S E R D A
N G

Alamat Penelitian : J L . N E G A R A . N O . I P E T A P
A H A N . K E C A M A T A N L U B U K
P A K A M

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
 2. Kwitansi SPP tahap berjalan
- Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Bapak Riva Ubar Harahap, SE, Ak, M.si., CA., CPA)

Wassalam
Pemohon

(Nabhilla Padma Widya Anofni)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa merangsang semangat agar disebarkan
kepada dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2261/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nabhilla Padma Widya Andini
N P M : 1805170088
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 04 Agustus 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Muharram 1444 H
04 Agustus 2022 M



Dekan

E. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kode Pos – 20154
Telepon (061)795 2007 Faks (061)795 4252

E-mail : admin@deliserdangkab.go.id Website : www.deliserdangkab.go.id

Nomor : Lubuk Pakam, Agustus 2022
Lampiran : - Kepada Yth
Sifat : - Bapak/Ibu Dekan
Perihal : Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
MEDAN

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Riset / Penelitian Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor Surat 22.56/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 04 Agustus 2022 | perihal seperti pada pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak merasa keberatan jika Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis melaksanakan penelitian di Kantor Bupati Deli Serdang dan melakukan penelitian di berbagai dinas lain atas nama :
Nama : Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088
Program Studi : Akuntansi
2. Untuk melaksanakan penelitian selama 15 hari terhitung dari tanggal 15 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022 dan mahasiswa yang bersangkutan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Sekretariat Daerah Lubuk Pakam.
3. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**An. BUPATI DELI SERDANG
SEKRETARIS DAERAH**



DARWINGIN.S.Sos
Utama Muda
NIP. 19621011 198409 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI
N P M : 1805170088
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Fenomena masalah penerapan sistem dengan indikator & pengelompokan & SPiP	26/7/22	3/
Bab 2	perbaikan bab 2 lihat form untuk setiap variabel. Konsep konsep di bawah	26/7/22	3/
Bab 3	perbaikan populasi & sampel teknik analisis data	26/7/22	3/
Daftar Pustaka	Referensi perlu lagi, mendalam	26/7/22	3/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Bawa Angket keesem	26/7/22	3/
Persetujuan Seminar Proposal			

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE.,M.Si.,Ak.,CA)

Medan, 26 Juli 2022
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE.,M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI
N P M : 1805170088
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI., SE.,M.Si.,Ak.,CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

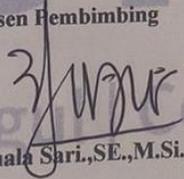
Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	Skala pengujian variabel ganti ordune	10/8 22	3/
Daftar Pustaka	Mendeley ; ambil referensi dan dosen	10/8 22	3/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	ganti kategori dgn SB - TB.	10/8 22	3/
Persetujuan Seminar Proposal	kec proposal skripsi lanjut ke seminar proposal	10/8 22	3/

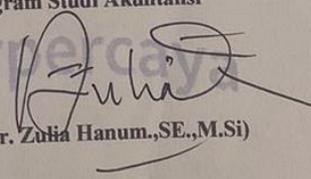
Medan, 10 Agustus 2022

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari., SE., M.Si., Ak., CA)


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 23 Agustus 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nabhilla Padma Widya Andini*
NPM. : 1805170088
Tempat / Tgl.Lahir : Sei Karang, 22 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jln. Petumbukan. Simp. SPP Desa Jaharun A
Judul Proposal : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Perbaiki 'identifikasi' masalah dan latar belakang masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki Bab II dengan lebih pedoman, pengertian, perbaikan kerangka konseptual.</i>
Bab III	<i>Perbaiki bab III sesuai hasil perbaikan pembimbing</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 23 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pemanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 23 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088
Tempat / Tgl.Lahir : Sei Karang, 22 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jln. Petumbukan. Simp. SPP Desa Jaharun A
Judul Proposal : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA*

Medan, 23 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pemanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si

NIDN : 0105087601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terdapat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2143/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 27 Muharam 1445 H
14 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang
Jln. Negara No. 1, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nabhilla Padma Widya Andini
N P M : 1805170088
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kode Pos – 20154
Telepon (061)795 2007 Faks (061)795 4252
E-mail : admin@deliserdangkab.go.id Website : www.deliserdangkab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 020/Sekda-Deli Serdang/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darwin Zein. S.Sos
Jabatan : Sekretaris Daerah
Alamat : Lubuk Pakam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas :

Nama : Nabhilla Padma Widya Andini
NPM : 1805170088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Bupati Deli Serdang dengan mengunjungi 31 Organisasi Perangkat Daerah Deli Serdang selama 3 (tiga) bulan. Terhitung mulai Agustus 2022 sampai dengan November 2022 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam, 20 November 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIAT DAERAH
SETDAKAB
DARWIN ZEIN.S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19621011 198409 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI
Tempat / Tgl Lahir : Sei Karang, 22 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Petumbukan Simpang SPP Desa Jaharun A Dusun II
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara

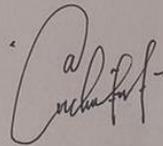
Nama Orang Tua

Ayah : Adhy Sulistiyanto
Ibu : Sumarni
Alamat : Jl. Petumbukan Simpang SPP Desa Jaharun A Dusun II

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Impres 105387 Sei Karang Tahun 2012
2. MTs YAPI BKAI Sei Karang Tamat Tahun 2015
3. SMA Nusantara Lubuk Pakam Tahun 2018
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Medan, 25 Agustus 2023



NABHILLA PADMA WIDYA ANDINI